



Kinerja Pemerintah Belum Efektif

BPK RI Segera Periksa Delapan Daerah

PONTIANAK-RK. BPK Perwakilan Kalbar menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis aktual tahun anggaran 2014 dan 2015.

Sampai dengan triwulan III pada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (KKR) dan Pemerintah Provinsi Kalbar di Kantor BPK RI Perwakilan Kalbar di Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Jumat (6/11).

Pemeriksaan kinerja ini adalah pemeriksaan tematik pusat (BPK) RI yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dan yang menjadi sampel di Provinsi Kalbar adalah KKR.

Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Didi Budi Satrio mengatakan, tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai efektivitas upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam implementasi standar akuntansi berbasis aktual, yang secara spesifik

diarahkan untuk menilai aspek utama yang signifikan dalam implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis aktual.

"Hal ini meliputi aspek komitmen, regulasi dan kebijakan, aspek pengelolaan sumber daya manusia pengelola keuangan, aset dan TI serta aspek pengelolaan teknologi informasi" ujar Didi.

Ia menjelaskan, secara umum hasil pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Kalbar dan Pemerintah KKR menunjukkan bahwa kedua pemerintah daerah tersebut telah melakukan upaya-upaya dalam mengimplementasikan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada laporan keuangan.

"Namun, hasilnya belum sepenuhnya efektif. Ada pun kondisi-kondisi yang perlu diperbaiki adalah regulasi dan kebijakan terkait penambahan masa manfaat aset tetap hasil overhaul maupun renovasi. Selain itu data kepegawaian

yang belum update, belum ada uraian tugas pengelola IT, tidak lengkapnya riwayat pendidikan dan pelatihan serta data tenaga kontrak/honor. Belum adanya analisis kebutuhan dan pengembangan aplikasi," timpalnya.

Ia menambahkan, BPK Perwakilan Kalbar dalam waktu dekat akan melaksanakan pemeriksaan atas kesiapan penerapan akuntansi akrual pada pemerintah daerah.

"Saat ini baru 7 pemerintah daerah yang sudah dilakukan pemeriksaan. Masih ada 8 pemerintah daerah yang belum dilakukan pemeriksaan," ujar Didi.

Didi berharap, pemerintah daerah yang belum dilakukan pemeriksaan agar dapat mempersiapkan data dan dokumen pendukung yang terkait tugas aspek tersebut untuk kelancaran pemeriksaan.

Sementara itu, Kepala Sub Auditor Kalbar I BPK RI, Patrice I Shombing menambahkan, gambaran umum dilihat

dari tiga aspek regulasi komitmen dan aspek sumber daya manusia serta IT. "Sama-sama kita lihat masih ada beberapa kekurangan dan hal positif yang sudah Pemda Provinsi Kalbar dan Kabupaten Kubu Raya lakukan," jelasnya.

Menurutnya, jadi tidak harus melihat temuan dalam ben-tuk data, namun ini hubungan dengan kinerja. "Sama-sama kita lihat sisi SDM di Pemerintah Provinsi Kalbar dan Kabupaten Kubu Raya masih perlu perbaikan kinerja, termasuk pemanfaatan IT. Yaitu belum update-nya data kepegawaian dan belum adanya uraian tugas pengelola TI," ulasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya mengatakan, terkait rekomendasi yang diserahkan BPK RI kepada Pemerintah Provinsi Kalbar untuk hasilnya, karena baru diserahkan sehingga belum dibuka.

"Hasilnya, saya belum membukanya. Namun secara

umum ada temuan positif dan ada yang perlu perbaikan. Artinya kinerja ini akan kita tindaklanjuti serta kita bahas. Karena kita mempunyai waktu 60 hari," ujar Christiandy Sanjaya.

Wagub menegaskan, tentunya apa yang menjadi catatan BPK RI pastinya ditindaklanjuti. Karena seperti yang diinginkan apa yang disampaikan Gubernur Cornelis terhadap jajaran pengelolaan keuangan harus benar serta memperhatikan kinerja.

Kata Wagub, ada tiga unsur yang disebutkan BPK RI Perwakilan Kalbar terkait kinerja tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen yang didukung dari tiga unsur tersebut.

"Artinya, ada komitmen pimpinan, SDM serta IT yang dapat saling mendukung dan tersedia sehingga kinerja dapat maksimal," ucapnya.

Reporter: Isfanyah
Redaktur: Andy Soe